

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada setiap Negara memiliki sistem tertentu untuk menjalankan pemerintahannya, ada beberapa sistem yang selama ini dikenal antara lain, Monarki, presidensial, komunis, dan demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Pada intinya, yang banyaklah yang menang dan yang banyak dianggap sebagai suatu kebenaran.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.<sup>1</sup>

Semenjak kemerdekaan 17 Agustus 1945, UUD 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam mekanisme

---

<sup>1</sup> <http://materikuliaah.net/artikel/perkembangan-demokrasi-di-indonesia.aspx>. Diakses tanggal 12 April 2017.

kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di Indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami masa Demokrasi Pancasila. Selama 25 Tahun berdiri Republik Indonesia ternyata bahwa masalah pokok yang kita hadapi adalah bagaimana, dalam masyarakat yang beranekaragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi disamping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis.

Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi dalam tiga masa yaitu :

1. Masa republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer.
2. Masa republik Indonesia II, yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya, dan menunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat.

3. Masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi yang menonjolkan sistem Presidensial.<sup>2</sup>

Perkembangan demokrasi di Indonesia diawali pada tahun 1945. Kemerdekaan Indonesia membawa sistem demokrasi di Indonesia, dimana presiden sebagai kepala Negara tidak secara mutlak memiliki kekuasaan. Akan tetapi presiden bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai wakil rakyat di dalam pemerintahan.<sup>3</sup>

Demokrasi di Indonesia mengalami transisi yang sangat berbeda antara era sebelum reformasi dengan era sesudah reformasi. Sebelum reformasi dapat dilihat pada masa orde baru.

Demokrasi pada masa orde baru belum mutlak terjadi di Indonesia, dimana pada masa orde baru demokrasi yang seharusnya menjadi hak rakyat masih dibatasi oleh besarnya kekuasaan dari pemerintah. Pada masa orde baru, angkatan-angkatan bersenjata di Indonesia masih menjadi penghalang besar bagi rakyat dalam mewujudkan demokrasi yang salah satu perwujudannya dapat dilakukan dalam hal hak untuk kebebasan menyampaikan pendapat.

Diakhir masa orde baru rakyat keluar dan memberanikan diri secara bersama-sama melakukan unjuk rasa terhadap apa yang telah dilakukan pemerintah selama masa orde baru. Setiap elemen masyarakat secara bersama-sama keluar kejalan untuk melakukan unjuk rasa dan berani melawan angkatanangkatan bersenjata Indonesia untuk satu tujuan melakukan reformasi.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Asvi Warman Adam, Habibie, Prabowo dan Wiranto Bersaksi, Media Kita, Jakarta, 2006, hal 2

Diakhir masa orde baru banyak demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk menentang pemerintahan orde baru, yang dianggap otoriter. Salah satu demonstrasi tersebut dapat kita lihat dari aktivis trisakti. Demonstrasi tersebut banyak dikenal dengan nama tragedi trisakti. Tragedi trisakti ini meletus pada tanggal 12 Mei 1998. Demonstrasi ini dilakukan oleh mahasiswa, akan tetapi lagi-lagi angkatan bersenjata menjadi lawan dari rakyat dalam demonstrasi ini. Dalam demonstrasi ini empat (4) mahasiswa tewas akibat peluru tajam.<sup>4</sup> Tragedi ini menjadi pemicu bagi rangkaian kerusuhan atau demonstrasi yang lebih besar.

Sejak pemerintahan Soeharto berakhir di tahun 1998, turut berubah pula pandangan hubungan sipil-militer di negeri ini. Negeri kita sebelumnya sangat didominasi oleh militer, dan memang hal ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Setelah reformasi bergulir, saluran demokrasi dan prasyarat Indonesia menjadi negara demokratis terbuka lebar. Kebebasan berpendapat secara lisan atau tulisan, baik melalui media cetak maupun media elektronik mengalami kemajuan yang sangat pesat. Namun, terkadang ada yang menyalah artikan kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut. Dengan mengartikan semua hal boleh diungkap walaupun melanggar etika, moralitas, dan hukum.

Sebagai negara demokrasi, tentunya Indonesia menganut prinsip bahwa rakyat adalah penentu utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seluruh bangsa Indonesia dijamin dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 2. Oleh karena itu,

---

<sup>4</sup> Habibie, Detik-Detik yang Menentukan : *Jalan Panjang Menuju Demokrasi THC Mandiri*, Jakarta, 2006, hal 32.

berbagai hak-hak yang melekat dalam diri warga negara dijamin sepenuhnya oleh negara atau Undang-undang.

Undang-undang Dasar 1945 memberikan jaminan konstitusional terhadap kemerdekaan mengemukakan pendapat. Dalam Pasal 28 UUD 1945, dinyatakan secara tegas bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.” Kemudian dalam Pasal 28E Ayat (3) menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kedua pasal tersebut membuktikan bahwa UUD 1945 memberikan jaminan bahwa mengemukakan pendapat adalah hak asasi yang dijamin oleh Undang-undang.

Dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1998 yang mengatur tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dinyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan tulisan secara bebas serta bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, Pasal 5 menyatakan “Warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum.”<sup>5</sup>

Sangat penting bagi negara untuk menerapkan sistem seperti ini agar negara melalui sistem pemerintahannya mampu menciptakan suasana yang kondusif. Dewasa ini banyak masalah atau isu yang menimbulkan kontroversi dikalangan internasional. Salah satu fenomena global yang menjadi sorotan adalah

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 9 Tahun 1998, *op. cit*, Pasal 5.

pergolakan politik dikawasan Pasifik Selatan karena sistem politiknya masih belum tertata dengan baik.<sup>6</sup> Salah satunya yaitu negara Fiji, karena politik Fiji kerap kali diwarnai aksi kudeta. Bahkan terhitung telah terjadi sebanyak empat kali selama dua dekade.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran penulis diatas, maka didapatkan rumusan masalah untuk menentukan jalan penelitian ini. Perumusan masalah dalam hal ini merupakan ruang lingkup yang akan diteliti oleh diteliti oleh penulis adalah “Mengapa Indonesia Membantu Upaya Demokratisasi Fiji?”.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui alasan mengapa Indonesia membantu usaha demokratisasi Fiji.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **A. Manfaat Praktis**

---

<sup>6</sup> Raratonga, 1994, *New Politics in the South Pasific*, Institute of Pasific Studies : University Of the South Pasific, hal. 3

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat membantu memberikan wawasan bagi pembaca mengenai Alasan Indonesia membantu usaha demokratisasi Fiji.

## **B. Manfaat Akademis**

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat berguna bagi pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional, khususnya kajian politik internasional tentang pengaruh suatu negara terhadap negara lainnya dalam mereformasi sistem pemerintahan. Selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya mengenai demokratisasi di Fiji maupun di negara lain.

### **1.4 Penelitian Terdahulu**

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk membandingkan dan juga membantu menunjang penulisan penelitian ini. Penelitian yang *pertama* adalah dari Dyan Artha Purvitasari dengan judul *Pengaruh Revolusi Melati Tunisia Terhadap Demokratisasi Mesir 2011*. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana revolusi Melati Tunisia 2010 mempengaruhi proses demokratisasi di Mesir pada tahun 2011. Hal ini ditandai dengan mundurnya Presiden Hosni Mubarak pada Februari 2011 dan diadakannya pemilu legislatif serta Presiden. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah demokratisasi Mesir merupakan demokratisasi yang tidak didorong oleh negara lain, tidak ada pihak luar yang memaksa melainkan dari

inisiatif Mesir untuk melakukan demokratisasi setelah merebaknya revolusi di Timur Tengah yang menjadi *trend* kebangkitan masyarakat dikawasan tersebut.<sup>7</sup>

Penelitian terdahulu *kedua*, mengenai *Demokratisasi Thailand (Kajian Dinamika dan Proses Demokrasi di Thailand)* yang ditulis oleh Reza Wirananto Gunarso. Dalam penelitiannya membahas mengenai dinamika dan proses demokrasi di Thailand. Dalam perjalanannya pemerintahan Thailand menganut sistem Monarki Konstitusional sejak tahun 1932 sampai 1997. Dalam kurun waktu tersebut terjadi dinamika politik yang membawa Thailand menjadi sering berganti-ganti pemerintahan dengan berbagai karakteristik seperti junta militer, otoriter, dan pemerintahan sipil. Dalam proses demokratisasi Thailand tidak lepas dari berbagai gangguan seperti kudeta yang sering terjadi di Thailand, subjektifitas hubungan sipil militer, friksi politik, isu-isu ekonomi, korupsi serta posisi raja. Dalam kasus demokratisasi Fiji dan Thailand sama-sama terdapat adanya kendala yakni adanya kudeta yang terjadi di negara tersebut. Perbedaannya, di Fiji proses demokratisasinya terdapat dorongan dari luar sedangkan Thailand proses demokratisasinya dari dalam negeri sendiri.<sup>8</sup>

Referensi selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Juhairi dengan judul *Pengaruh Gerakan Anti Globalisasi Terhadap Perkembangan Demokratisasi di Indonesia Pasca Orde Baru*. Penelitian ini membahas mengenai alasan anti globalisasi berpengaruh terhadap perkembangan

---

<sup>7</sup> Dyah Artha Purvitasari, *Pengaruh Revolusi Melati Tunisia Terhadap Demokratisasi Mesir 2011*, Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, 2012.

<sup>8</sup> Reza Wirananto Gunarso, *Demokratisasi Thailand (Kajian Dinamika dan Proses Demokrasi di Thailand)*, Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, 2013.



sebuah demokratisasi dan membahas bagaimana gerakan tersebut berpengaruh terhadap perkembangan demokratisasi di Indonesia pasca orde baru. Penelitian ini menjelaskan pengaruh gerakan tersebut tidak untuk melemahkan demokratisasi tetapi justru akan menguatkan demokratisasi yang dianggap telah melenceng dari makna sesungguhnya akibat globalisasi ekonomi yang dipaksakan disetiap negara khususnya Indonesia. Penelitian penulis merupakan kesinambungan dari penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Juhairi ini yang mana dalam penelitian yang penulis lakukan Indonesia sudah mencapai tahap tidak lagi dalam usaha demokratisasi tapi sudah pada tahap mendorong negara yakni Fiji untuk membantu proses demokratisasi.<sup>9</sup>

Referensi terakhir skripsi dari Reinintha Julia P dengan judul *Intervensi Amerika Serikat Tahun 1994-1998 dan Dampaknya Terhadap Kondisi Politik-Ekonomi-Sosial Haiti*. Penelitian ini membahas mengenai intervensi Amerika Serikat di Haiti tahun 1994-1998 yang berpengaruh terhadap kondisi politik, ekonomi, dan sosial negara Haiti. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai pengaruh Amerika Serikat dalam sektor politik, ekonomi, dan sosial merupakan proses demokratisasi di Haiti karena adanya anggapan bahwa sebuah negara demokratis memiliki kecenderungan untuk menjadi negara yang memiliki perekonomian yang lebih maju. Penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan memiliki kesamaan yaitu ada sebuah negara yang sedang membantu negara lain untuk menjadi negara demokratis. Perbedaannya Indonesia hanya membantu

---

<sup>9</sup>Ahmad Juhairi, *Pengaruh Gerakan Anti Globalisasi Terhadap Perkembangan Demokratisasi di Indonesia Pasca Orde Baru*, Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, 2011.

proses demokratisasinya saja, sedangkan Amerika membantu dalam sektor politik, ekonomi, dan sosial dalam proses demokratisasi.<sup>10</sup>

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu:**

NO	JUDUL DAN NAMA PENELITI	JENIS PENELITIAN DAN ALAT ANALISA	HASIL
1	Skripsi: Pengaruh Revolusi Melati Terhadap Demokratisasi Mesir 2011. Oleh: Dyan Artha Purvitasari.	Deskriptif-Kualitatif.  Pendekatan: Konsep Globalizing Social Movement Theory dan Gelombang Demokratisasi.	Pengaruh revolusi Tunisia 2010 terhadap proses demokratisasi di Mesir pada 2011 ditandai dengan merebaknya revolusi di Timur Tengah dengan gaya <i>Tunisian Style</i> .  Hal ini menjadi sebuah tren kebangkitan masyarakat di kawasan tersebut kemudian menginspirasi Mesir dan negara-negara yang berada di sekitarnya untuk melakukan demoukratisasi.  Demokratisasi tersebut juga dipengaruhi oleh peran media

<sup>10</sup>Reinintha Julia P, *Amerika Serikat Tahun 1994-1998 dan Dampaknya Terhadap Kondisi Politik-Ekonomi-Sosial Haiti*. Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, 2010.

			sosial.
<sup>2</sup>	Skripsi: Demokratisasi Thailand (Kajian Dinamika dan Proses Demokrasi di Thailand). Oleh: Reza Wirananto Gunarso.	Deskriptif.  Pendekatan: Demokrasi, Demokratisasi, Kudeta dan Pretorianisme, Hubungan Sipil-Militer.	Kudeta, konflik warga sipil dan militer serta raja mewarnai dinamika proses demokratisasi di Thailand. Sering terjadinya kudeta merupakan wujud dari sistem pemerintahan yang masih belum stabil, karena militer seringkali bertindak melampaui batas kewenangannya karena ada campur tangan dari raja. Itu membuktikan bahwa demokrasi di Thailand masih mengalami pasang surut dan menemui kendala yang cukup banyak berupa sering terjadinya kudeta, seobjektifitas hubungan militer, friksi politik, isu-isu ekonomi, korupsi serta posisi raja.
<sup>3</sup>	Skripsi: Pengaruh	Kualitatif-Eksplanatif.	-Gerakan anti-globalisasi dan

	<p>Gerakan Anti-Globalisasi Terhadap Perkembangan Demokratisasi di Indonesia Pasca Orde Baru.</p> <p>Oleh: Ahmad Juhairi.</p>	<p>Pendekatan:</p> <p>Gerakan sosial, gerakan transnasional, demokratisasi, gerakan masyarakat sipil.</p>	<p>demokratisasi sebagai gerakan sosial yang bersifat transnasiona.</p> <p>-Gerakan anti-globalisasi sebagai gerakan alternatif untuk melakukan perubahan sosial.</p> <p>-Gerakan anti-globalisasi dan demokratisasi sebagai implikasi globalisasi.</p> <p>-Gerakan anti-globalisasi sebagai alat revitalisasi demokrasi dan alat konsolidasi demokrasi akibat globalisasi.</p> <p>-Anti-globalisasi mendorong demokratisasi ke ranah yang lebih substansial.</p> <p>-Demokratisasi mutlak membutuhkan gerakan anti-globalisasi.</p>
4	<p>Skripsi: Intervensi Amerika Serikat Tahun 1994-1998 dan Dampaknya Terhadap Kondisi Politik-</p>	<p>Korelasional</p> <p>Pendekatan:</p> <p>Neoliberal Geopolitik dan Demokratisasi.</p>	<p>Bentuk dari intervensi Amerika Serikat terhadap Haiti adalah dengan demokratisasi untuk menstabilkan kondisi politik di Haiti. Diharapkan ketika</p>

	Ekonomi-Sosial Haiti. Oleh: Reinintha Julia P.		demorasi di Haiti berhasil dikembangkan maka tujuan-tujuan neoliberal akan diterapkan di Haiti. Keberhasilan penerapan neoliberal di Haiti pada akhirnya memberikan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Peningkatan hanya terjadi pada sektor pendidikan dimana tingkat buta huruf dan jumlah sekolah umum meningkat.
5	Reineer Sandi Yudha , alasan Indonesia membantu usaha demokratisasi Fiji	Eksplanatif - <i>Democracy Peace Theory</i> -konsep demokratisasi	

## 1.5 Kerangka Teori dan Konsep

### 1.5.1 Demokrasi Menurut *Democracy Peace Theory*

Penelitian ini akan dibantu dengan *Democracy Peace Theory* yang dapat menjawab dari rumusan masalah diatas. *Democracy Peace Theory* adalah suatu

teori atau pemahaman bahwa jika dibangunnya sistem demokrasi dalam suatu negara maka negara tersebut akan cenderung menghindari perang terkecuali untuk melakukan pertahanan diri. Pemahaman ini dicetuskan oleh Immanuel Kant seorang filsuf Jerman pada sekitar tahun 1795.<sup>11</sup>

Dalam pembahasannya ada dua alasan yang teoritik yang dapat menjelaskan mengapa negara yang menganut sistem demokrasi tidak ingin memerangi negara demokrasi lainnya. Dua alasan tersebut dijelaskan oleh Zeev Maos dan Bruce Russett (1993) tentang “Penjelasan Struktural dan Penjelasan Normatif”.<sup>12</sup>

### **Penjelasan Struktural**

Hal ini dikarenakan dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi maka prosedur pembuatan kebijakannya memiliki hambatan struktural (*checks and balances*). Hambatan seperti inilah yang dipercayai dapat mencegah negara demokrasi memasuki ranah peperangan. Pada tingkatan umum, penjelasan dari struktural menyatakan bahwa para elit di negara yang menganut sistem demokrasi dikendalikan oleh rakyat negaranya, sehingga menyebabkan upaya untuk mobilisasi perang dapat dihambat.

Dalam struktur negara demokrasi, legislatif merupakan lembaga struktural yang bisa menghambat eksekutif ketika ingin memutuskan perang. Dengan adanya hambatan tersebut, negara-negara demokrasi dapat dicegah untuk memulai

---

<sup>11</sup> Mtholyoke, “Immanuel Kant Perpetual Peace : A Philosophical Sketch”, <http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/kant/kant1.htm>

<sup>12</sup> Portalhi, “kritik terhadap teori perdamaian demokrasi”, <http://portalhi.web.id/?p=124>

perang. Dapat dilihat dalam realita, jika dua negara demokrasi saling berkonfrontasi satu dengan lainnya secara internasional, mereka tidak akan terburu-buru untuk memutuskan berperang karena pemimpin-pemimpinnya memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara damai.

Satu jenis penjelasan struktural lainnya menyatakan bahwa proses berdemokrasi seperti kebebasan berbicara dari rakyat dapat membuat negara demokrasi terhindar dari hal-hal yang bisa memunculkan kesalahpahaman, karena publik tidak akan pernah menginginkan negaranya terjerumus dalam perang. Sementara itu satu jenis penjelasan struktural lainnya menyatakan bahwa proses berdemokrasi seperti kebebasan berbicara dari publik dapat membuat negara-negara demokrasi terhindar dari hal-hal yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, karena publik tidak akan menghendaki negaranya terjerumus dalam perang.

### **Penjelasan Normatif**

Penjelasan normatif memiliki dua asumsi yang penting. Penjelasan yang pertama dari perdamaian demokratik menyatakan bahwa norma-norma yang dimiliki negara-negara demokrasi diyakini dapat mencegah perang diantara mereka. Salah satu argumen ini menilai bahwa negara yang menganut sistem liberal tidak akan memerangi negara liberal lainnya, karena hal itu dapat melukai prinsip-prinsip pokok dalam liberalisme itu sendiri.

Negara-negara liberal hanya akan memulai perang ketika ia bermaksud memapankan tujuan-tujuan liberalnya seperti peningkatan kebebasan individual di

negara lain. Negara liberal tidak dapat memapankan tujuan liberalnya apabila memerangi negara liberal lainnya. Dengan kata lain, demokrasi tidak bisa berperang karena ideologi liberal tidak memberikan justifikasi untuk berperang antara negara demokrasi liberal.

Sementara itu versi kedua dari penjelasan normatif ini menjelaskan bahwa demokrasi memiliki suatu norma yang diwujudkan dalam bentuk resolusi damai atas konflik. Norma-norma tersebut penerapannya pada resolusi damai atas konflik. Seperti yang kita ketahui dalam menyelesaikan konflik domestik, negara demokrasi melakukannya tanpa kekerasan, dan melalui itulah mereka dapat menyelesaikan perselisihan internasional mereka secara damai.<sup>13</sup>

Dari penjelasan diatas penulis mencoba menggunakan teori ini untuk menganalisa bagaimana sebuah sistem Negara yang menjalankan suatu sistem demokrasi akan lebih meminimalisir tingkat konflik dari bawah ke atas (rakyat ke eksekutif), dari kalangan akar rumput (sesama rakyat) ataupun dengan Negara-negara lainnya. Disini Indonesia ingin berusaha agar Negara Fiji yang notabene Negara kecil agar dapat menjalin kerjasama dari berbagai sektor, agar Fiji mencapai suatu sistem yang dinilai ideal saat ini untuk dijalankan suatu Negara. Indonesia harus membangun citra positif dengan Negara-negara *Melanesia Sparates Group* (MSG), hal tersebut disebabkan propaganda-propaganda yang menyudutkan Indonesia yang dinilai memiliki masa lalu yang kurang baik terhadap beberapa negara pasifik selatan.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*



### **1.5.2 Konsep Demokratisasi**

Demokratisasi adalah proses pendemokrasian segenap rakyat untuk turut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya atau turut serta dalam berbagai bidang kegiatan (masyarakat/negara) baik langsung maupun tidak langsung, dengan mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi warga negara. Pengertian demokrasi juga dapat dikatakan sebagai proses menuju demokrasi yang disebut sebagai demokratisasi. Dalam menuju ke demokrasi yang kita dambakan merupakan proses yang tidaklah mudah.<sup>14</sup>

Demokratisasi merupakan jalan keluar dari otoritarianisme, disebabkan demokratisasi adalah proses yang mengembalikan hak hak rakyat, sehingga mengapa banyak rakyat yang menyukai demokrasi, sedangkan dibawah pemerintahan yang sifatnya atau bentuknya otoriter dengan meniadakan demokrasi, menyebabkan hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, kebudayaan, ekonomi dibatasi. Karena itu dukungan terhadap demokratisasi akan sangat menentukan keberhasilan proses tersebut.

Penulis menggunakan konsep Demokratisasi untuk menganalisa pergerakan Indonesia yang pada awalnya di motori oleh Presiden ke 2 Indonesia yaitu Soeharto yang tujuan awalnya hanya untuk membangun citra positif dan sekedar membantu Negara yang dianggap terbelakang karena masih bergantung pada Negara Australia dan di anggap Negara yang belum bebas dan merdeka sepenuhnya. Dan banyaknya konflik serta kudeta yang terjadi pada pemerintahan. Hal tersebut disebabkan kurangnya rakyat mendapatkan perhatian dari penguasa

---

<sup>14</sup> Imawan (dalam Syamsuddin haris 2007:43-44).

yang dinilai menjadi sapi perah dan memunculkan kesenjangan ekonomi yang tinggi dan lebih banyaknya kemiskinan. Dewasa ini Fiji ingin merubah seluruh sistem pemerintahan yang sebelumnya otoriter menjadi demokrasi yang berkaca terhadap Indonesia yang dinilai berhasil menjalankan pemerintahan yang demokrasi. Untuk itu Indonesia ingin membantu proses demokratisasi Fiji. Dengan konsep ini penulis menerangkan bantuan apa saja yang Indonesia berikan dalam membantu proses demokratisasi Fiji.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Level Analisa**

Dalam penelitian ini penulis menentukan *alasan Indonesia Membantu Proses Demokratisasi* dalam level Negara sebagai variabel dependen atau unit analisa, sedangkan variabel independen atau unit eksplanasinya adalah *Proses Demokratisasi Fiji* yang juga masuk dalam level negara, karena yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah alasan Indonesia membantu sistem demokrasi Fiji.

### **1.6.2 Metode/Tipe Penelitian**

Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Eksplanatif-Kualitatif dikarenakan metode tersebut bertujuan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi. Eksplanatif-

Kualitatif sendiri berusaha memahami kejadian sosial berdasarkan pandangan-pandangan subjektif dari para pelaku. Penelitian jenis ini menganggap masyarakat adalah kumpulan dari individu-individu manusia sebagai subjek.

### **1.6.3 Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisa data hasil penelitian adalah *kualitatif*. Adapun dalam menganalisa permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan argumen yang tepat.

### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Yaitu mengumpulkan data yang dilakukan oleh penulis berupa artikel, catatan, laporan transkrip, surat kabar, buku, akses internet, maupun majalah yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian di dokumentasikan dan diolah menjadi penelitian.

### **1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian**

#### **a. Batasan Waktu**

Dalam melakukan penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan batasan waktu pada tahun 1997, dikarenakan pada tahun tersebut Indonesia fokus dan semangat dalam membantu Negara Fiji yang menganut system otoriterian agar masuk ke dalam system demokrasi.

#### **b. Batasan Materi**

Bagaimana upaya dan sebab-sebab Indonesia mau membantu proses demokratisasi di Negara Fiji. Karena beberapa potensi dan faktor-faktor.

#### **1.7 Hipotesa**

Terlepas dari masalah kudeta, Fiji sendiri ingin memperbaiki sistem pemerintahan yang sebelumnya tidak memandang hak asasi manusia dan cenderung lebih ke otoriter. Maka dari itu Fiji ingin meminta bantuan dari Indonesia. Melihat dari segi sejarah proses demokrasi Indonesia yang hampir sama dengan yang dialami oleh Fiji. Pemerintah Indonesia pun melihat kesempatan ini untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya di kawasan Pasifik Selatan.

#### **1.8. Sistematika Penulisan**

<b>BAB I</b>	<b>1.1. Latar Belakang</b>
<b>Pendahuluan</b>	<b>1.2. Rumusan Masalah</b>

	<p><b>1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b></p> <p><b>1.3.1. Tujuan Penelitian</b></p> <p><b>1.3.2. Manfaat Akademis</b></p> <p><b>1.3.3. Manfaat Praktis</b></p> <p><b>1.4. Penelitian Terdahulu</b></p> <p><b>1.5. Kerangka Teori dan Konsep</b></p> <p><b>1.5.1. Demokrasi menurut <i>Democracy</i></b> <b><i>Peace Theory</i></b></p> <p><b>1.5.2. Konsep Demokratisasi</b></p> <p><b>1.6. Metodologi Penelitian</b></p> <p><b>1.6.1. Level Analisa</b></p> <p><b>1.6.2. Metode/Tipe Penelitian</b></p> <p><b>1.6.3. Teknik Analisa Data</b></p> <p><b>1.6.4. Teknik Pengumpulan Data</b></p> <p><b>1.6.5. Ruang Lingkup Penelitian</b></p> <p><b>1.7. Hipotesa</b></p> <p><b>1.8. Sistematika Penulisan</b></p>
<b>BAB II</b>	<p><b><i>Gambaran Kondisi Negara Fiji</i></b></p> <p><b>2.1 Kondisi Negara Fiji</b></p> <p><b>2.1.1. Demokrasi</b></p> <p><b>2.1.2. Hak Asasi Manusia (HAM)</b></p> <p><b>2.1.3. Media</b></p> <p><b>2.1.4. Pemilu</b></p>

	<p><b>2.2. Kondisi Demokrasi Fiji Paska Kudeta Tahun 2006</b></p> <p><b>2.3. Upaya Indonesia membantu Demokratisasi di Fiji</b></p>
<p><b>BAB III</b></p>	<p><i>Alasan Indonesia membantu proses Demokratisasi di Fiji</i></p> <p><b>3.1. Kepentingan Nasional Indonesia</b></p> <p><b>3.1.1. Mempertahankan Kedaulatan Negara Republik Indonesia (NKRI)</b></p> <p><b>3.1.2. Menunjukkan Citra Indonesia Sebagai Negara Dengan Kapabilitas Militer Yang Tinggi di Kawasan Pasifik Selatan</b></p> <p><b>3.1.3. Memperjuangkan Keanggotaan Indonesia dalam Melanesian Sparehead Group dengan Cara membuka Peluang Kerjasama dengan Negara-negara Pasifik Selatan</b></p>
<p><b>BAB IV</b></p> <p><b>Penutup</b></p>	<p><b>4.1. Kesimpulan</b></p> <p><b>4.2. Saran</b></p>